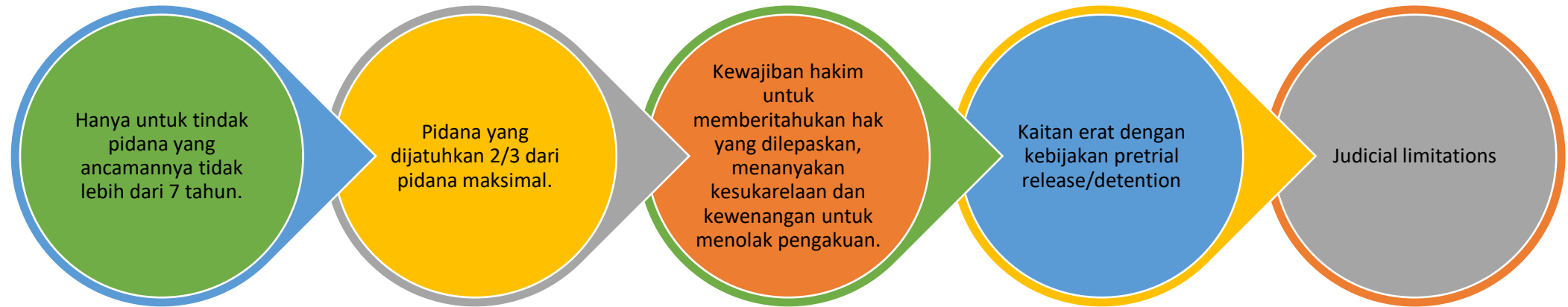


Ichsan Zikry

Prinsip-Prinsip Relevan dalam Mekanisme Plea Bargaining: Perbandingan dengan Amerika Serikat



Hanya untuk
tindak pidana
yang
ancamannya
tidak lebih dari
7 tahun.

- Pembatasan hanya untuk *Plea Bargaining*, bukan *Open Plea*.
- Legislative limit

State: mandatory minimum penalties for certain crimes and factors to consider such as evidentiary problems, Defendants willingness to cooperate, discovery of facts which mitigate seriousness of D's conduct

Federal: Reflect the seriousness of the offense, Promote respect for the law, Provide just punishment, afford deterrence, protect the public, Offer D an opportunity for effective rehabilitation

- California: Violent sex crimes, habitual offender, DUI, firearms, murder, rape, sodomy, arson etc (41 offenses) (only if prosecutors lack of evidence/ reduction or dismissal would not result in a substantial change in sentence)
- Washington: Plea agreement under certain situations (evidentiary problem, defendants willingness to cooperate in investigation or prosecutions of others whose criminal conduct is more serious or represents a greater public threat a request by victim, discovery of facts which mitigate the seriousness of the defendants' conduct)

Berapa banyak kategori tindak pidana yang memenuhi kualifikasi ini

Facts:

Penyidikan tahun 2018: 250.9k

- pencurian berat (27K), pencurian kendaraan bermotor (21K), tipu gelap (19k), narkoba (38k), cyber crime (1.7k) dan korupsi, ilegal logging, illegal mining (2.5k)
- yang tindak pidananya masuk kategori maksimal 7 tahun hanya 3 Pasal di UU Narkotika (pasal 122 ayat (1)-menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 3 dibawah 5 gram, 125 ayat (1) membawa menigirm mengangkut mentransito golongan 3 kurang dari 5 gram dan 127, penyalahguna – pencurian) Pasal 362, dan Sebagian Pasal 363 dan 364)

Take out



Jalur Khusus-> mengimplementasikan peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Pembatasan dikhawatirkan membuat sistem tidak berjalan efektif karena tidak sesuai dengan fakta mengenai tindak pidana yang terjadi di lapangan.



Prinsipnya, pembatasan diperlukan plea bargaining adalah untuk melindungi kepentingan publik dan kepentingan penegakan hukum. Oleh karena itu, yang dibatasi adalah bargainingnya. Bukan mengaku bersalahnya (*open plea*).

Pidana yang dijatuhkan 2/3 dari pidana maksimal.

- Prinsip: Insentif dari suatu pengakuan bersalah dan Uniformity in sentencing
- Insentif untuk open plea = pengurangan hukuman. Insentif untuk plea bargaining = prison location, charging, sentencing, facts, treatment)
- Federal: US v Booker & States: Also have Sentencing Guideline.
- Untuk plea bargaining, penawaran keringanan hukum mengacu ke sentencing guidelines. Sentencing guideline sifatnya advisory, tetapi departure upward atau downward membutuhkan alasan. Sehingga departurennya dapat diprediksi tidak terlalu ekstrim.
- Sedangkan untuk open plea, dari kebiasaan yang ada "One estimate placed the discount in the federal system at about 30 to 40 percent of the typical sentence imposed on those convicted after trial. See U.S. Sentencing Commission, Supplemental Report on the Initial Sentencing Guidelines and Policy Statements 48
- Judges can reject agreement between P and D but usually will follow P recommendation.

Take out

- Predictability dalam hal pengurangan hukuman.
- Di RKUHAP, faktor predictabilitasnya kurang karena bar nya hanya 2/3 maksimal hukuman
- Ketidakjelasan insentif, dalam hal jumlah pengurangan hukuman, sudah terjadi dalam praktik saksi mahkota, justice collaborator atau secara umum melalui pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan. Masalahnya berakar dari tidak adanya ukuran jelas insentif pengurangan hukuman yang akan diterima.
- Perlu dipertimbangkan, walaupun akan diadopsi, untuk menganut konsep plea bargaining, bukan hanya open plea. ATAU. Ada pedoman pemidanaan yang jelas yang membuat hukuman yang mungkin dijatuhkan menjadi lebih predictable.
- Tanpa adanya predictability, Jalur Khusus dikawatirkan tidak efektif.

kewajiban hakim untuk memberitahukan hak yang dilepaskan, lamanya pidana yang mungkin dikenakan, menanyakan apakah diberikan secara sukarela, dan kewenangan untuk menolak pengakuan apabila ada keraguan terhadap kebenaran pengakuan terdakwa

Knowingly

- Direct consequences of conviction : nature of charges + procedural rights
 - consisting knowing nature of charges and direct consequences of plea (including maximum sentence authorized, restitution payment, sex offender registration- there are split holding regarding whether a consequence is a direct consequence)
 - judges are obliged to explain “critical elements” (Henderson v Morgan)
- Nature of trial rights they are waiving
 - Boykin hearing: record must show that defendants understand the privilege against self-incrimination, right to trial by jury and right to confront their accusers (Boykin v Alabama)
 - Rule 11: Judges will ensure whether or not defendants have mental capacity to answer questions/check for demeanor (in colloquy, judges will ask name, level of education, whether or not he is comfortable with his attorney and what he feels about him)

Regarding to right to counsel:

- Right to counsel kicks in a critical stage (Gideon v Wainwright, Rothgery v Gillespie county. the test is what contribution a counsel can do) and after the initiation of adversarial judicial proceedings)
- Defendants must be represented or must waive right to counsel (Moore v Michigan)
- Waiver must be tested (Faretta v California. Knowing and voluntary. Fact: rarely granted)
- Padilla v Kentucky (if counsel fails to explain direct consequences, conviction can be overturned)

Voluntarily

- Any kind of force, threats, or promises (other than promises in plea agreement) invalidates plea guilty. Physical force for sure one of them
- Package deal: you admit your guilt and 3rd party will not be prosecuted -reviewed with suspicion/no ban
- Coercive overcharging: piling charges to induce guilty plea. -no ban

Adequate factual basis v veracity of the admission of guilt

- Factual basis = lower than beyond reasonable doubt. (other than defendant's confession)
- Alford plea (pleading guilty while insisting on his innocence). Diperbolehkan. Knowing dan voluntary. Bukan veracity of the guilty plea. "Veracity" dicover dengan standar factual basis

Take out

- Tanpa adanya safeguard right to legal counsel, pengujian aspek “knowing” tidak terjamin.
- Tidak ada treatment jelas atas pengakuan yang diberikan secara tidak sukarela. RKUHAP hanya menyebut boleh menolak, apabila ragu dengan kebenarannya. Claim tidak voluntir harus diikuti dengan penolakan pengakuan bersalah.
- Pengujian veracity of the admission of guilt tidak jelas. Standarnya hanya ragu. Terlalu luas dan subyektif. Hakim harus dibantu dengan standar yang jelas dalam menentukan apakah ada cukup basis untuk meyakini bahwa pengakuan yang diberikan benar adanya.
- Tujuannya agar jangan sampai ada orang yang mengaku bersalah padahal tidak melakukan cuma karena takut atau lebih buruk lagi menjadi “Tumbal” (mencegah terjadinya Alford Plea)

Kaitan erat dengan kebijakan pretrial release/detention

- Liberty is the norm v Detention is the norm.
- Lebih dari 10 juta penangkapan. 500 ribu orang dalam status penahanan pra sidang. Aturan penahanan lebih ketat. Namun angka penahanan tetap tinggi dibandingkan negara lain.
- Penahanan memicu false (Kassin et al. 2009).
- Penahanan pra sidang berdampak pada case outcomes. (Dobbie et al: 2016)
- Dilakukan pada tahap pra persidangan dan sebelum right to discovery attached (pengakuan bersalah dan tidak bersalah menentukan kick off right to discovery)

Korelasi penahanan pra sidang, maksimal hukuman yang dapat dijatuhkan, dan waktu pelaksanaan Jalur Khusus.

- Amerika: terjadi di tahap awal. Standar penahanan ketat. Kemungkinan pengakuan bersalah diberikan dalam kondisi tersangka tidak ditahan -> meminimalisir potensi false confession dan case outcomes lebih positif.
- Indonesia: terjadi di tahap akhir (setelah proses pra-persidangan selesai), standar penahanan lemah, kemungkinan pengakuan bersalah diberikan dalam kondisi tersangka ditahan. -> meningkatkan risiko false confession dan case outcomes negative.
- Reformasi sistem penahanan atau percepat proses Jalur Khusus (jangka waktu).

Judicial Limitations

- Judge shall not involve in any plea discussion (Fed Crim Pro 11 (C) (1)).
- Judge cannot interfere, giving opinions and personal knowledge. Only facilitating the entry of a knowing and voluntary guilty plea (State v Bouie)

Penutup

- Ketergantungan US CJS terhadap mekanisme Plea Bargaining. “Ours is for the most part a system of pleas, not a system of trials.” Missouri v. Frye, 132 S.Ct. 1399 (2012)”. Tanpa Plea Bargaining, sistem kolaps.
- Jalur khusus harus disertai safeguards yang cukup (hak atas bantuan hukum, insentif, prosedur dan standar yang jelas